

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA PANGAN DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Strategy Implementation on Integrated Food Program to Improve Rural Community Empowerment in North Central Timor

Stefanus Bekun¹, Abdul Juli Andi Gani², M. Makmur²

¹ Program Magister Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

² Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Pelaksanaan program Padat Karya Pangan untuk dapat menjawab permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat desa di kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan Program Padat Karya Pangan pemerintah berusaha memenej strategi kegiatan tersebut dengan sistem kerja yang inovatif dan kreatif, komitmen dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa, sebab masyarakat Timor Tengah Utara memiliki banyak potensi seperti lahan yang cukup untuk mengolah kebun, didukung dengan Penyuluh Pertanian Lapangan / Pendamping Lapangan yang kreatif. Walaupun demikian, ada kendala seperti masyarakat masih mempertahankan sistem kerja yang tebas bakar, kualitas pendampingan dilapangan yang belum optimal. Karena itu pemerintah perlu memenej strategi pelaksanaan program Padat karya Pangan dengan sistem kerja yang kompetitif, strategi pendekatan pemberdayaan yang intensif, membangun koordinasi yang baik diantara pelaksana program padat karya pangan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci: Manajemen strategi strategi , pemberdayaan masyarakat.

Abstract

Food Work Compact (PKP – *Padat Karya Pangan*) Program is implemented to answer the problems of poverty and powerlessness of rural community at North Central Timor District. Through Food Work Compact Program, the government attempts to manage the strategy of this program with innovative and creative work system, with commitment and with approach to empowerment of rural community. Such management is important because the community of North Central Timor has potentials such as adequate land for gardening and the presence of Field Agriculture Counselor/ Field Mentor who will use their creativity in counseling. However, some constraints are found such as community's habit to work on slash-burn work system and less optimum quality of field counseling. Therefore, the government needs to manage the implementation strategy of Food Work Compact with competitive work system, intensive empowerment approach strategy, and good coordination between the implementing actors of Food Work Compact Program to improve the empowerment of rural community.

Keywords: Strategic management , Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Masyarakat desa di kabupaten Timor Tengah Utara adalah masyarakat petani, yang berusaha mempertahankan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian. Dengan segala kemampuan dan keterampilannya yang terbatas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, melalui program-program pembangunan pemerintah. Kemampuan yang terbatas ini, membuat mereka terbelakang, dan terlilit dalam kemiskinan .

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak mengaktualisasikan dirinya karena berbagai keterbatasan yang dialaminya [1]. Keadaan tersebut di Kabupaten Timor Tengah Utara disebabkan karena kerawanan pangan dan persoalan-persoalan lainnya. Untuk menekan masalah kemiskinan, perlu mengoptimalkan bidang - bidang pertanian sebagai jalan utama untuk mengelola potensi sumber daya yang ada melalui kebijakan yang populis lalu diikuti dengan pola pendampingan yang tepat. Dari kenyataan ini pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang urgen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu upaya membuat masyarakat

Alamat korespondensi:

Stefanus Bekun

Email : stefanusbekun@yahoo.co.id

Alamat : Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang Jl. Veteran, Malang.

dapat mengatur dirinya secara mandiri agar secara bebas mengambil tindakan-tindakan, membuat keputusan-keputusan terhadap apa yang akan ia laksanakan. Jadi inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik dari individu, kelompok maupun masyarakat [2].

Pemberdayaan ini tidak terlepas dari pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin yang diutarakan Suryono 2010, h.262 [1] yaitu: (1) pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin, (2) Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi dan (3) Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komonikator dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Dengan pendekatan tersebut masyarakat Timor Tengah Utara diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara bertani yang baik dengan pola padat karya pangan untuk memberdayakan diri guna meningkatkan produksi pangannya. Tetapi kondisi konkret di kabupaten Timor Tengah Utara sesuai laporan kegiatan pengelolaan beras miskin dengan pola padat karya pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Pertanian tanaman Pangan dan perkebunan kabupaten TTU 2011, terlihat sebagai berikut [3] :

1. Perubahan iklim global yang ditandai dengan: curah hujan tidak menentu, musim kemarau yang berkepanjangan sampai dengan mengeringnya sejumlah sumber mata air, ketidak-jelasan batas antara musim hujan dan musim kemarau serta terjadinya bencana alam.
2. Luas lahan kritis mencapai 123. 663 ha, yang terdiri dari 54.145 ha dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan 69.518 ha.
3. Praktek bertani tradisional yang masih didominasi oleh sistem tebas bakar dan perladangan berpindah-gilir, sistem monokultur dengan dominasi tanaman pangan serta kurang memperhatikan sistem koservasi tanah dan air.
4. Kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat tergolong rendah, dimana 68 % atau 36.734 Kepala Keluarga dari 54.326 Kepala Keluarga tergolong keluarga miskin (Badan Pusat Statistik kabupaten Timor Tengah Utara

2009). Jumlah keluarga miskin cukup besar ditandai dengan jumlah rumah tangga penerima beras bagi keluarga miskin. Rumah tangga miskin sesuai dengan penetapan penerima raskin tahun 2011 sebanyak 26.558 Kepala Keluarga.

5. Kondisi ekonomi makro kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih rendah.
6. Program Padat Karya Pangan belum diterjemahkan oleh pemerintah desa sampai tingkat kabupaten menjadi program wajib bagi semua masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.
7. Pemahaman para pihak, baik tim koordinasi maupun tim teknis tentang program Padat Karya Pangan belum searah sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis sehingga informasi yang diterima masyarakat juga berbeda-beda.
8. Masih ada kepala desa dan camat yang kurang memberikan dukungan secara signifikan dalam mengimplementasikan program Padat Karya Pangan.
9. Ada Penyuluh Pertanian Lapangan dan fasilitator Lembaga Swadaya Masyarakat yang kurang bertugas secara optimal. Hal ini karena sebagian dari mereka berdomisili di kota.
10. Waktu yang dibutuhkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, Mantri tani, Pendamping lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan komite desa dalam penyelesaian teknis administrasi Padat Karya Pangan lebih banyak daripada waktu untuk pendampingan di lapangan. Hal ini karena teknis administrasi yang harus diselesaikan cukup banyak.

Program Padat Karya Pangan adalah strategi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa, menjadi prioritas utama program strategis pembangunan daerah kabupaten Timor Tengah Utara, yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011-2015. Dalam RPJMD ini, Program Padat Karya Pangan menjadi bagian dari salah satu program strategis Bupati Timor Tengah Utara yakni program pengembangan pertanian.

Dari petunjuk teknis tersebut terlihat maksud Program Padat Karya Pangan yakni untuk

mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan raskin dengan cara memberi bobot lebih melalui pengorganisasian keluarga tani, kerja gotong royong mengelola lahan untuk usaha pertanian, pendampingan, pertemuan koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk terus memperkuat dampak kerja sama menuju ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan keluarga tani. Dengan diberi bobot lebih ini memiliki tujuan yakni mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan keluarga tani miskin dengan menyediakan sumber-sumber penghidupan baru secara berkelanjutan serta mendorong penyebaran sistem pertanian yang ramah lingkungan melalui bantuan beras miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain itu bahwa keluarga miskin dapat mengakses bahan pangan beras tanpa mengeluarkan uang tunai, melainkan dengan kompensasi tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas tanaman musiman terutama mendorong pengembangan tanaman jagung, kacang tanah dan bawang putih siung tunggal sebagai icon Kabupaten Timor Tengah Utara. Serta keluarga miskin memiliki kebun menetap dan membudidayakan tanaman umur panjang unggulan sebagai tabungan atau jaminan hari tua / pensiun petani.

Tujuan Padat Karya Pangan tersebut memiliki sasaran yang jelas yakni: berkurangnya beban pengeluaran tunai dari 26.558 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), yang tersebar di 24 kecamatan dan 174 Desa /Kelurahan dan 1 desa adat dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencukupi pangan beras. Dan untuk mencapainya pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memberdayakan masyarakat dengan cara: Pembersihan lahan dan pengolahan tanah, Pembuatan terasering dan pemupukan, Penanaman tanaman semusim dan tanaman umur panjang, Penanam tanaman sela dan penyiangan, Perluasan sawah baru, Pengerjaan sawah dan perbaikan irigasi, Budidaya sayur, jagung, kacang tanah dan kacang hijau.

Strategi pemberdayaan petani demikian, menjadi hal yang urgen tetapi kegiatan ini berjalan belum maksimal karena :

1. Ada sebagian kecil masyarakat desa terutama kota tidak memiliki lahan yang cukup.
2. Kepemilikan lahan pada lokasi yang berbeda (ada masyarakat yang menetap di desa lain namun lahannya berada di desa tetangga).
3. Ada oknum Aparatur kecamatan, Desa / Kelurahan yang kurang mendukung dan cenderung menghambat pelaksanaan prog-

ram Padat Karya Pangan; misalnya tidak menindaklanjuti kesepakatan yang dibangun diantaranya pagar pemisah daerah peternakan dan pertanian setelah itu tidak dilanjutkan dan dapat menyebabkan ternak merusak lahan yang telah dikelola.

4. Biaya operasional Tim koordinasi / Tim teknis kecamatan dan desa / Kelurahan yang tidak dialokasikan.
5. Ada oknum Aparatur Desa yang memiliki kecenderungan untuk membagikan beras miskin (raskin) kepada segenap kepala keluarga yang ada dalam desa / Kelurahan (termasuk Pegawai Negeri Sipil / pensiunan dan petani yang tidak mengerjakan tipe pekerjaan Padat Karya Pangan).
6. Konteks pendampingan yang belum maksimal (pemahaman, komitmen) pada semua sektor yang kompeten.
7. Tidak tersedianya benih tanaman penguat teras, Tanaman Umur Panjang dan tanaman sela sebagai bentuk dukungan dalam penerapan teknis budidaya yang lengkap.
8. Ada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak mencukupi target areal dan tipe pekerjaan sesuai yang ditentukan dalam petunjuk teknis Padat Karya Pangan.
9. Masih ada kecenderungan petani untuk melakukan kebun berpindah-pindah dengan pola tebas bakar tanpa memaksimalkan potensi lahan yang tersedia dekat pemukiman.

Evaluasi pelaksanaan program PKP tahun 2011 dan gagasan pelaksanaan PKP tahun 2012. [4].

Persoalan ini tidak terlepas dari strategi sebagai landasan pelaksanaan Program Padat Karya Pangan. Strategi oleh Tripomo & Udan (2005.h.18) adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. [5].

Dari Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pelaksanaan Program Padat karya Pangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara"

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif, yang dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya di lapangan.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini yakni di kabupaten Timor Tengah Utara, dengan situs penelitiannya di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Timor Tengah Utara.

b. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan datanya yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

d. Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni tehnik yang digunakan oleh Miles & Huberman (2009), yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi [6].

e. Keabsahan data

Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan oleh Moleong, (2010) yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) [7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pelaksanaan Program padat karya pangan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Timor Tengah Utara yakni dengan strategi pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan program Padat Karya Pangan di kabupaten Timor Tengah Utara melekat langsung dengan tugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan pendamping lapangan dalam pendekatannya kepada masyarakat petani. Pendekatan yang diartikan sebagai suatu gaya yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*) Axinn (1998) dikutip Mardikanto dan soebiato (2012,h.159) [8]. Karena itu, Penyuluh Pertanian Lapangan dan pendamping lapangan oleh Suryono, (2010,h.262) [1] bahwa "... pendekatan pendampingan kepada masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komonikator dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian". Untuk mencapai pendekatan demikian PPL atau pendamping Lapangan harus memiliki kualifikasi. Dan oleh Berlo (1960) dikutip Mardikanto dan Soebiato (2012,h.143-144) [8] bahwa kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh / fasilitator mencakup :

kanto dan Soebiato (2012,h.143-144) [8] bahwa kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh / fasilitator mencakup :

1. Kemampuan berkomunikasi: kemampuan dan keterampilan penyuluh / fasilitator untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat.
2. Sikap penyuluh/fasilitator yang:
 - a. Menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugasnya itu sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaat.
 - b. Meyakini bahwa inovasi yang disampaikan itu telah teruji kemampuannya.
 - c. Menyukai dan mencintai masyarakat penerima manfaatnya, dalam artian selalu siap memberikan bantuan dan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi berlangsungnya perubahan-perubahan usahatani maupun perubahan kehidupan masyarakat penerima manfaatnya.
3. Kemampuan pengetahuan penyuluh / fasilitator tentang :
 - a. Isi, fungsi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, baik secara konseptual (keilmiah) maupun secara praktis.
 - b. Latar belakang dan keadaan masyarakat penerima manfaatnya, baik yang menyangkut perilaku, nilai-nilai sosial budaya, keadaan alam, maupun kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan masyarakat penerima manfaatnya.
 - c. Segala sesuatu yang seringkali menyebabkan warga masyarakat suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan maupun segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat seringkali cepat/ lambat mengadopsi inovasi.
4. Karakteristik sosial budaya penyuluh / fasilitator:

Penyuluh / fasilitator yang baik, sejauh mungkin harus memiliki latar belakang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat penerima manfaatnya. Setidak - tidaknya, jika seorang penyuluh atau fasilitator akan bertugas di wilayah kerja yang memiliki kesenjangan sosial budaya yang telah dimilikinya, ia harus selalu berusaha untuk menyiapkan diri dan berusaha

terus menerus mempelajari dan menghayati nilai - nilai sosial budaya masyarakat penerima manfaatnya itu.

Dengan kualifikasi tersebut dapat meningkatkan strategi pendekatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam melaksanakan Program Padat Karya Pangan.

Pendekatan yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni pendampingan, pelatihan, pembinaan, penguatan kapasitas petani, memberikan bimbingan tentang teknik bertani, cara pembuatan teras, tanaman umur panjang. Dengan pendekatan ini masyarakat agak sulit untuk melaksanakannya, dan kembali kepada kebiasaan bertani yang tradisional.

Untuk merubah pola pikir bertani masyarakat yang demikian, oleh (Suryono, 2010, h.263-264) bahwa pendekatan pemberdayaan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

“Pertama, datangi dan dekati masyarakat yang hendak diperdayakan (*go to people*) ; kedua, hidup dan tinggalah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya (*live among the people*) ; ketiga, belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada dibenak mereka, potensi apa yang mereka miliki (*learn form the people*); keempat, ajak dan ikutkan masyarakat dalam proses perencanaan (*plan with the people*); kelima, ajak dan libatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan rencana (*work with the people*); keenam, mulailah dari apa yang masyarakat telah tahu dan pahami (*start with what the people know*); ketujuh, bangunlah sesuatu dari sumber kemampuan dan modal yang masyarakat miliki (*Build and what the people have*); kedelapan, ajarilah masyarakat dengan contoh-contoh yang jelas dan dapat dilaksanakan (*Teach by showing, learn by doing*); kesembilan, jangan dipameri mereka dengan sesuatu yang menyalaukan (pepesan kosong), tetapi berikanlah kepada mereka suatu pola yang realistik (*Not a showcase, but a pattern*); kesepuluh, jangan tunjukkan kepada mereka sesuatu yang pesimistik sebagai akhir dari segalanya, tetapi berikanlah kepada mereka suatu sistem yang optimistis, baik dan benar (*Not odds and ends, but a system*); kesebelas, jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-sepotong (parsial), tetapi pendekatan menyeluruh dan terpadu (*Not piecemeal, but integrated approach*); keduabelas, bukan penyesuaian cara, model, atau bentuknya (*Not a conform, but to transform*); ketigabelas, jangan memberikan penyelesaian akhir kepada mereka, tetapi berilah

kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri (*not relief, but release*).”[1].

Dengan prinsip tersebut ditegaskan Suharto (2010,h.67-68) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan .
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha [10].

KESIMPULAN

Masyarakat Timor Tengah Utara yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, memiliki kemampuan dan keterampilan terbatas dalam mengelola lahan pertanian. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, berjuang untuk keluar dari masalah-masalah yang dihadapi yakni kemiskinan, yang disebabkan karena kerawanan pangan dan persoalan-persoalan lainnya.

Untuk menekan persoalan tersebut, pemerintah mengoptimalkan bidang pertanian dengan memfokuskan pada program padat karya pangan sebagai jalan utama memberdayakan petani. Program Padat Karya Pangan sebagai upaya maksimal mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan beras miskin dengan cara memberi bobot lebih melalui pengorganisasian keluarga tani, kerja gotong royong mengelola lahan pertanian untuk memperkuat kerja sama menuju ketahanan pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya, terkendala dengan perubahan iklim yang tidak menentu, lahan yang kritis, praktek bertani yang tradisional, pelaksanaan Program Padat Karya Pangan yang belum searah dan Penyuluh Pertanian Lapangan belum bertugas maksimal di desa. Dari persoalan ini, strategi pendekatan pemberdayaan menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan bertani masyarakat. Dan strategi pendekatan yang dimaksud yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, yang merupakan strategi yang sangat penting dalam meningkatkan program padat karya pangan di kabupaten Timor Tengah Utara.

Saran

Dari kesimpulan tersebut dapat disarankan bahwa strategi pelaksanaan padat karya pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam memenej strategi pelaksanaan program padat karya pangan, mengefektifkan pendekatan pemberdayaan yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dengan cara penyuluh pertanian lapangan, oleh Suryono (2010) [8] bahwa hidup dan tinggal dengan masyarakat desa agar mengenal kepentingan dan kebutuhannya.
2. Pemerintah daerah dapat mentransformasi semangat kewirausahaan yaitu suatu semangat kejiwaan dalam mengolah lahan pertanian dengan cara melalui penyuluhan, melalui pemberian contoh nyata, melalui pemberian kesempatan, dan melalui proses pembelajaran terus menerus (Wasistiono 2003).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembimbing Bapak Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS dan Bapak Dr. M. Makmur, MS yang membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dan kepada pemerintah daerah Kabu-

paten Timor Tengah Utara (TTU) yang mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian di Kabupaten Timor Tengah Utara dan terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan saudara, semoga amal baik anda Tuhanlah yang memberkati semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Suryono, Agus. 2010. Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan, Malang, Universitas Brawijaya Press.
- [2]. Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita selekta Manajemen Pemerintah Daerah. cv. Bandung, Fokus Media.
- [3]. Laporan kegiatan pengelolaan beras miskin dengan pola padat karya pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan kabuapten timor Tengah Utara, 2011.
- [4]. Bahan presentasi Bupati Timor Tengah Utara tentang Evaluasi pelaksanaan program padat karya pangan tahun 2011 dan gagasan pelaksanaan PKP tahun 2012.
- [5]. Tripomo, Tedjo dan Udan. 2005. Manajemen Strategi. Bandung, Rekayasa sains.
- [6]. Miles B. Mattew dan Huberman Michael A. 2009. Analisa data kualitatif. Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- [7]. Moleong J. Lexy, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- [8]. Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
- [9]. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- [10]. Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Bandung, Refika Aditama.